Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 35358-35368

EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH: INTEGRASI PERSPEKTIF *TAM, USABILITY, DELONE & MCLEAN MODEL*, DAN *HUMAN CAPITAL THEORY*

Ainun Wulandari[1], Naila Auliya Fazarina[2], Hersa Farida Qoriani[3]

[1,2,3] **Program Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kh Achmad Siddiq Jember**

*Email: ainunwd123@gmail.com, nailauliya052@gmail.com, hersafaridaqoriani@uinkhas.ac.id
Corresponding Author: Ainun Wulandari, ainunwd123@gmail.com

Published: Juni, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mendukung administrasi keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jember dengan mengintegrasikan beberapa pendekatan teoritis, yaitu *Technology Acceptance Model* (*TAM*), teori *usability (ISO 9241-11)*, *DeLone and McLean Information System Success Model*, serta *Human Capital Theory*. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam kepada pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan SIPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah mampu mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis, mulai dari penganggaran, penggajian, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporan keuangan. Dari perspektif *TAM*, sistem ini memiliki tingkat persepsi kemanfaatan yang tinggi karena mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai, meskipun pada aspek kemudahan penggunaan masih ditemukan kendala pada tahap awal implementasi. Dari perspektif *usability*, SIPD dinilai cukup efektif dan efisien, namun masih menghadapi keterbatasan pada stabilitas sistem dan fleksibilitas penggunaan. Sementara itu, berdasarkan *model DeLone and McLean*, kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan masih memerlukan perbaikan, khususnya terkait akurasi data dan keandalan sistem. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi sistem. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan integratif yang mengombinasikan empat kerangka teori dalam mengevaluasi implementasi SIPD secara komprehensif, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sistem informasi di sektor publik. Secara keseluruhan, implementasi SIPD memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi keuangan daerah, namun masih diperlukan peningkatan kualitas sistem, integrasi data, serta pengembangan kompetensi pengguna agar manfaat sistem dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *SIPD, Administrasi Keuangan Daerah, TAM, Usability, Delone & Mclean, Sektor Public*

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in supporting financial administration at the Department of Public Works and Spatial Planning (DPUPR) of Jember Regency by integrating multiple theoretical frameworks, namely the Technology Acceptance Model (TAM), usability theory (ISO 9241-11), DeLone and McLean Information System Success Model, and Human Capital Theory. This research employs a qualitative approach with a descriptive method, where data were collected through in-depth interviews with employees directly involved in financial management and SIPD usage. The findings indicate that SIPD has successfully integrated all stages of regional financial management in a systematic manner, including budgeting, payroll, administration, accounting, and financial reporting. From the TAM perspective, the system demonstrates a high level of perceived usefulness, as it enhances employees' efficiency and effectiveness, although challenges remain in perceived ease of use, particularly during the initial implementation phase. From a usability perspective, SIPD is considered relatively effective and efficient; however, it still faces limitations in system stability and user flexibility. Furthermore, based on the DeLone and McLean model, system quality, information quality, and service quality require further improvement, especially in terms of data accuracy and system reliability. In addition, human resource competency is identified as a critical factor influencing the success of system implementation. The novelty of this study lies in the integrative approach that combines four theoretical frameworks to

comprehensively evaluate the implementation of SIPD, thereby providing a more holistic understanding of the factors influencing the effectiveness of information systems in the public sector. Overall, the implementation of SIPD has contributed positively to improving the efficiency of regional financial administration; however, further improvements are needed in system quality, data integration, and user competency development to optimize its benefits sustainably.

Keywords: *SIPD, Regional Financial Administration, TAM, Usability, Delone & Mclean, Public Sector*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem administrasi pemerintahan. Transformasi digital pada sektor publik menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurut Indrajit (2002), *e-government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha, maupun antarinstansi pemerintah secara lebih efektif dan efisien. Penerapan teknologi digital dalam pemerintahan tidak hanya bertujuan untuk mempermudah proses administrasi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia terus mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui penerapan konsep *e-government* di berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Transformasi digital di bidang keuangan daerah menjadi penting karena pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu indikator utama terciptanya *good governance*. Menurut Mardiasmo (2018), *good governance* ditandai oleh adanya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun sistem pengelolaan keuangan yang mampu menjamin keterbukaan informasi, ketepatan data, serta efisiensi proses administrasi.

Sebagai bentuk implementasi transformasi digital tersebut, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem terintegrasi untuk mendukung pengelolaan pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang keuangan dan pembangunan daerah. SIPD merupakan sistem berbasis elektronik yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah dalam satu platform terpusat (Gusman, 2024).

Penerapan SIPD menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi karena sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Menurut Laudon dan Jane Laudon (2016), sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu organisasi dalam meningkatkan koordinasi kerja, mempercepat arus informasi, serta mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih akurat. Dalam konteks pemerintahan daerah, keberadaan SIPD memungkinkan data keuangan daerah tersimpan secara terpusat sehingga dapat meminimalkan kesalahan administrasi, duplikasi data, dan keterlambatan pelaporan.

Selain itu, SIPD juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Transparansi menjadi aspek penting dalam pengelolaan keuangan publik karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran daerah direncanakan dan digunakan. Menurut Sedarmayanti (2012), transparansi dalam pemerintahan merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Dengan sistem yang terintegrasi seperti SIPD, proses pengelolaan keuangan daerah dapat terdokumentasi secara digital sehingga mempermudah proses pengawasan dan audit.

Perkembangan teknologi informasi dalam sektor pemerintahan mendorong instansi daerah untuk menerapkan sistem digital yang mampu meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan keuangan secara lebih efektif dan transparan. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

(SIPD) menjadi salah satu bentuk transformasi digital yang bertujuan mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah secara terintegrasi. Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Masruroh dkk. mengenai internalisasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada aplikasi SIPD menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi berbasis digital dapat mendukung peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan administrasi pemerintahan. Selain itu, penggunaan sistem informasi akuntansi juga membantu proses pengolahan data keuangan menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mudah diakses sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi SIPD memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan daerah. SIPD dinilai mampu meningkatkan efektivitas administrasi, mempercepat proses penyusunan anggaran, meningkatkan akurasi data keuangan, serta mempermudah proses pelaporan keuangan daerah (Amadhea Virdiana Phita dkk., 2025). Sistem yang terintegrasi juga dapat membantu sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah sehingga proses pembangunan menjadi lebih terarah dan terukur.

Namun demikian, implementasi SIPD di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Penelitian yang dilakukan oleh Hersadjati dkk. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SIPD belum optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, ketidakstabilan sistem, gangguan *server*, serta rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dan kemampuan pengguna.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Davis (1989) yang menyatakan bahwa penerimaan pengguna terhadap teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Jika pengguna merasa sistem sulit digunakan atau tidak memberikan manfaat yang signifikan terhadap pekerjaan mereka, maka tingkat penerimaan teknologi akan rendah. Dalam konteks SIPD, persepsi pengguna menjadi faktor penting karena sistem ini digunakan secara langsung oleh pegawai pemerintah daerah dalam menjalankan proses administrasi keuangan sehari-hari.

Selain faktor penerimaan pengguna, aspek kualitas sistem juga menjadi penentu keberhasilan implementasi SIPD. Menurut William DeLone dan Ephraim McLean (2003) dalam *DeLone and McLean Information System Success Model*, keberhasilan suatu sistem informasi dipengaruhi oleh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan sistem, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih yang dihasilkan sistem tersebut. Dengan demikian, apabila SIPD memiliki kualitas sistem yang baik, informasi yang akurat, dan layanan yang memadai, maka tingkat kepuasan pengguna dan keberhasilan implementasi sistem akan semakin tinggi.

Di sisi lain, aspek *usability* juga menjadi perhatian penting dalam implementasi sistem informasi pemerintahan. Berdasarkan standar ISO 9241-11 (2018), *usability* didefinisikan sebagai tingkat efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna dalam menggunakan suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem yang memiliki *usability* tinggi akan lebih mudah dipahami, dipelajari, dan digunakan oleh pengguna. Menurut International Organization for Standardization (2018), *usability* menjadi indikator penting dalam menilai kualitas interaksi antara pengguna dengan sistem teknologi informasi. Dalam implementasi SIPD, *usability* menjadi faktor penting karena sistem digunakan oleh pegawai dengan latar belakang kemampuan teknologi yang berbeda-beda.

Selain faktor teknologi dan kualitas sistem, kompetensi sumber daya manusia juga menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi SIPD. Menurut Gary Becker (1993), sumber daya manusia merupakan aset penting organisasi yang memiliki nilai ekonomi melalui pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki. Dalam konteks organisasi publik, kompetensi pegawai sangat memengaruhi efektivitas penggunaan teknologi informasi. Pegawai yang memiliki kemampuan teknologi dan pemahaman sistem yang baik akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan sistem kerja berbasis digital.

Dalam konteks Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jember, implementasi SIPD telah diterapkan sejak tahun 2022 sebagai bagian dari kebijakan nasional

digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. SIPD digunakan untuk mendukung berbagai proses administrasi keuangan, mulai dari penganggaran, penggajian, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporan keuangan. Penggunaan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja serta mempermudah koordinasi antarbagian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun demikian, berdasarkan kondisi di lapangan masih ditemukan berbagai kendala dalam implementasi SIPD di DPUPR Kabupaten Jember. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain kesulitan pengguna dalam memahami alur sistem, kurangnya fleksibilitas penggunaan, gangguan teknis sistem, serta kendala jaringan yang memengaruhi proses administrasi keuangan. Selain itu, masih terdapat pegawai yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan sistem digital karena keterbatasan kemampuan teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi SIPD masih memerlukan evaluasi yang komprehensif agar sistem dapat berjalan secara optimal.

Untuk memahami keberhasilan implementasi SIPD secara lebih mendalam, diperlukan pendekatan analisis yang komprehensif dengan menggunakan berbagai kerangka teori. *Technology Acceptance Model* (TAM) digunakan untuk menganalisis persepsi pengguna terhadap kemudahan dan kemanfaatan sistem. Teori *usability* berdasarkan ISO 9241-11 digunakan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem. Selanjutnya, *DeLone and McLean Information System Success Model* digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem informasi berdasarkan kualitas sistem, kualitas informasi, dan kepuasan pengguna. Sementara itu, *Human Capital Theory* digunakan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap keberhasilan penggunaan SIPD.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan karena tidak hanya mengevaluasi implementasi SIPD dari satu perspektif, tetapi mengintegrasikan berbagai pendekatan teoritis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan implementasi sistem. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan integratif yang mengombinasikan empat teori, yaitu *Technology Acceptance Model* (TAM), *usability*, *DeLone and McLean Information System Success Model*, dan *Human Capital Theory* dalam menganalisis implementasi SIPD pada satu instansi pemerintah daerah secara mendalam.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan efisiensi administrasi keuangan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jember, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penggunaan sistem berdasarkan perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), *usability*, *DeLone and McLean Information System Success Model*, dan *Human Capital Theory*.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini membahas berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah. SIPD merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan dalam satu sistem yang terpusat dan terstandarisasi (Silvia Hardianti Manik dkk., 2025a). Penerapan SIPD bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi keuangan daerah sehingga proses pengelolaan keuangan menjadi lebih sistematis, terdokumentasi, serta mampu meminimalkan kesalahan pencatatan. Selain itu, SIPD juga berfungsi sebagai alat pengendalian internal karena seluruh prosedur dalam sistem telah mengikuti alur kerja yang telah ditetapkan (Agnes Fontanella Un Bau dkk., 2025). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan berbasis digital mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, terutama dari segi ketepatan waktu, akurasi, dan konsistensi data. Namun, keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknologi, kualitas sistem, dan kompetensi sumber daya manusia (Silvia Hardianti Manik dkk., 2025b).

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Masruroh dkk. berjudul "Internalisasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat" membahas pentingnya penerapan sistem informasi akuntansi berbasis digital dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa implementasi SIPD berperan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi keuangan melalui sistem yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Selain membantu proses pengolahan data keuangan secara lebih cepat dan sistematis, penerapan SIPD juga dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pemanfaatan SIPD dalam mendukung efisiensi administrasi keuangan serta optimalisasi penggunaan sistem informasi pada instansi pemerintah daerah.

Untuk menganalisis penerimaan pengguna terhadap SIPD, penelitian ini menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989. Model ini menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. *Perceived usefulness* berkaitan dengan keyakinan pengguna bahwa sistem dapat meningkatkan kinerja pekerjaan, seperti mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akurasi pelaporan keuangan. Sementara itu, *perceived ease of use* berkaitan dengan tingkat kemudahan sistem untuk dipahami dan digunakan tanpa memerlukan usaha yang besar (Gemawaty & Yuliani, 2026). Semakin tinggi persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan sistem, maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi tersebut.

Selain TAM, penelitian ini juga menggunakan teori *usability* berdasarkan standar ISO 9241-11 yang mendefinisikan *usability* sebagai kemampuan suatu sistem untuk digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan kepuasan kepada pengguna dalam mencapai tujuan tertentu (Dzatama dkk., 2025). Konsep ini penting dalam evaluasi sistem informasi publik karena pengguna memiliki kemampuan teknologi yang berbeda-beda. *Usability* terdiri atas tiga aspek utama, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan pengguna menyelesaikan tugas secara tepat dan lengkap, efisiensi berkaitan dengan penggunaan waktu dan tenaga secara optimal, sedangkan kepuasan pengguna berkaitan dengan kenyamanan dan penerimaan pengguna terhadap sistem (Nik Ahmad dkk., 2021). Dalam implementasi SIPD, tingkat *usability* dipengaruhi oleh desain antarmuka, kemudahan navigasi, dan stabilitas sistem dalam mendukung aktivitas pengguna (Sulistyanti, 2025).

Penelitian ini juga menggunakan *DeLone and McLean Information System Success Model* sebagai kerangka evaluasi keberhasilan sistem informasi. Model ini memiliki enam dimensi utama, yaitu *system quality*, *information quality*, *service quality*, *use*, *user satisfaction*, dan *net benefits* (De Vinci Research Center dkk., 2025). *System quality* berkaitan dengan kualitas teknis sistem seperti keandalan dan kemudahan penggunaan, sedangkan *information quality* berkaitan dengan kualitas informasi yang dihasilkan, seperti akurasi dan relevansi data. *Service quality* menilai kualitas dukungan teknis yang diberikan kepada pengguna. Sementara itu, *use* dan *user satisfaction* menggambarkan tingkat penggunaan dan kepuasan pengguna terhadap sistem, sedangkan *net benefits* menunjukkan manfaat yang diperoleh organisasi dari penggunaan sistem informasi tersebut (Postgraduate Program, University of Merdeka Malang, Indonesia dkk., 2025). Model ini digunakan untuk menilai sejauh mana SIPD mampu memberikan manfaat nyata dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain faktor sistem dan teknologi, penelitian ini juga menggunakan *Human Capital Theory* yang menekankan pentingnya sumber daya manusia sebagai aset organisasi. Menurut teori ini, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pegawai dapat meningkatkan produktivitas dan keberhasilan organisasi (Grugulis, 2024). Dalam implementasi sistem informasi, kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penting karena pegawai yang memiliki kemampuan teknologi informasi lebih mudah beradaptasi dan mampu memanfaatkan sistem secara optimal. Sebaliknya, rendahnya kompetensi dapat menjadi hambatan dalam penggunaan sistem meskipun teknologi yang digunakan sudah baik (Dahlia & Ruswanti, 2025). Penelitian Rizki dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi sistem informasi di sektor publik. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan diperlukan untuk mendukung implementasi SIPD agar berjalan lebih efektif dan optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mendukung administrasi keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jember, dengan lokasi penelitian yang dipilih karena instansi tersebut telah mengimplementasikan SIPD sejak tahun 2022 sehingga memungkinkan dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap penggunaan sistem; data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan serta penggunaan SIPD, dan data sekunder yang berasal dari dokumen resmi seperti laporan keuangan, pedoman penggunaan sistem, serta literatur ilmiah yang relevan; teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung terhadap proses penggunaan sistem, serta dokumentasi sebagai data pendukung, sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori yang digunakan yaitu *Technology Acceptance Model* (*TAM*), teori *usability (ISO 9241-11)*, *DeLone and McLean Information System Success Model*, serta *Human Capital Theory*; untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang mencakup triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, sehingga hasil penelitian yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi SIPD dalam Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jember, dapat diketahui bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah digunakan secara menyeluruh dalam mendukung seluruh tahapan siklus pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai instrumen yang mengintegrasikan berbagai proses keuangan mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga penyusunan laporan keuangan secara sistematis dan terstandarisasi.

Pada tahap penganggaran, SIPD memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menyusun rencana kerja dan anggaran melalui fitur yang telah dirancang secara terstruktur dan berbasis sistem. Proses penginputan data anggaran dapat dilakukan secara lebih awal, yaitu pada periode sebelum tahun anggaran berjalan, sehingga memberikan fleksibilitas dalam perencanaan keuangan. Selain itu, sistem juga memungkinkan adanya penyesuaian dan revisi anggaran secara lebih terkontrol, sehingga meminimalkan kesalahan dalam perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa SIPD telah mendukung prinsip perencanaan yang lebih efektif dan berbasis data.

Selanjutnya, pada tahap penggajian, SIPD berperan dalam mengelola data kepegawaian serta proses pembayaran gaji secara terintegrasi. Sistem ini memungkinkan seluruh data terkait penggajian terdokumentasi secara sistematis, sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Namun demikian, dalam praktiknya, sistem ini memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas karena pengguna diharuskan mengikuti alur kerja yang telah ditentukan secara berurutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem memiliki struktur yang kuat, fleksibilitas pengguna dalam mengakses dan memproses data menjadi relatif terbatas.

Pada tahap penatausahaan, SIPD berfungsi sebagai media pencatatan transaksi keuangan yang meliputi penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Seluruh transaksi tersebut dicatat dalam satu sistem yang terintegrasi, sehingga meningkatkan keteraturan administrasi dan meminimalkan risiko kehilangan data. Selain itu, integrasi antar modul memungkinkan data yang telah diinput pada satu tahap dapat digunakan kembali pada tahap berikutnya tanpa perlu melakukan input ulang, sehingga meningkatkan efisiensi kerja.

Pada tahap akuntansi, SIPD mampu mengotomatisasi proses penyusunan jurnal akuntansi dan laporan keuangan berdasarkan data transaksi yang telah dicatat pada tahap sebelumnya. Otomatisasi ini memberikan manfaat dalam mengurangi beban kerja manual serta meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam penyusunan laporan keuangan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan

beberapa permasalahan, seperti ketidaksesuaian data antar modul dan terjadinya pencatatan ganda (*double jurnal*), yang menunjukkan bahwa integrasi sistem belum sepenuhnya berjalan dengan optimal.

Selain itu, kendala teknis seperti maintenance sistem, keterlambatan penyimpanan data, serta ketergantungan pada jaringan internet juga menjadi faktor yang memengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun SIPD telah memberikan banyak manfaat dalam pengelolaan keuangan daerah, kualitas implementasinya masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung tata kelola keuangan yang lebih optimal.

Analisis Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (*TAM*)

Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived ease of use*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan SIPD di kalangan pegawai DPUPR Kabupaten Jember cenderung berada pada kategori cukup baik, meskipun tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama pada tahap awal implementasi sistem. Kemudahan penggunaan sistem ini tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses adaptasi yang cukup panjang yang melibatkan pelatihan, pengalaman penggunaan, serta interaksi langsung dengan sistem.

Pelatihan berupa Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang diberikan sebelum implementasi sistem terbukti memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan pemahaman pengguna terhadap alur kerja SIPD. Melalui pelatihan tersebut, pengguna dapat memahami struktur sistem, fungsi setiap modul, serta prosedur operasional yang harus diikuti dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti pelatihan dan pendampingan teknis sangat berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan suatu sistem informasi.

Namun demikian, pada tahap awal penggunaan, sebagian besar pegawai mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem, terutama karena kompleksitas alur kerja SIPD yang mengharuskan pengguna mengikuti tahapan secara berurutan. Selain itu, perubahan dari sistem manual ke sistem digital juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pegawai yang belum terbiasa dengan teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan tidak hanya dipengaruhi oleh desain sistem, tetapi juga oleh faktor pengalaman pengguna dan kesiapan dalam menghadapi perubahan teknologi.

Selain itu, pembaruan sistem yang dilakukan secara berkala juga menuntut pengguna untuk terus beradaptasi dengan perubahan fitur dan alur kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan perkembangan sistem. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang berkelanjutan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan teknis agar pengguna dapat terus menyesuaikan diri dengan perubahan sistem.

Persepsi Kemanfaatan (*Perceived usefulness*)

Dari sisi kemanfaatan, SIPD terbukti memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam meningkatkan kinerja pegawai, khususnya dalam hal efisiensi dan efektivitas kerja. Sistem ini memungkinkan proses pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara lebih cepat dan terstandarisasi, sehingga mengurangi potensi kesalahan yang sering terjadi pada pencatatan manual.

Selain itu, kemudahan dalam mengakses data historis dan laporan keuangan sebelumnya juga memberikan manfaat dalam mempercepat proses pengambilan keputusan. Pengguna tidak perlu lagi melakukan pencarian data secara manual, karena seluruh data telah tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi dan dapat diakses kapan saja.

Otomatisasi dalam penyusunan jurnal akuntansi dan laporan keuangan juga menjadi salah satu keunggulan u*TAM*a SIPD. Dengan adanya fitur ini, beban kerja administratif dapat dikurangi secara signifikan, sehingga pegawai dapat lebih fokus pada tugas-tugas yang bersifat analitis dan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa SIPD memiliki tingkat *perceived usefulness* yang tinggi karena mampu memberikan manfaat nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas pengguna.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif *Technology Acceptance Model*, dapat disimpulkan bahwa tingkat penerimaan SIPD oleh pengguna dipengaruhi secara positif oleh persepsi kemudahan dan kemanfaatan, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas penggunaan sistem.

Analisis Berdasarkan Teori *Usability (ISO 9241-11)*

Dalam perspektif usability, implementasi SIPD dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna, yang secara keseluruhan mencerminkan kualitas interaksi antara pengguna dan sistem.

Dari aspek efektivitas, SIPD telah mampu membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas administrasi keuangan secara lebih terstruktur dan sistematis. Pengguna dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem, sehingga meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Namun demikian, masih ditemukannya kesalahan seperti ketidaksesuaian data dan double jurnal menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya mampu menjamin akurasi output yang dihasilkan.

Dari aspek efisiensi, SIPD memberikan manfaat dalam mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Integrasi data dalam satu sistem memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dengan lebih cepat tanpa harus melakukan pencarian manual. Akan tetapi, efisiensi tersebut masih terganggu oleh kendala teknis, seperti sistem yang tidak selalu berjalan secara real-time dan ketergantungan pada jaringan internet yang stabil.

Sementara itu, dari aspek kepuasan pengguna, sebagian besar pegawai merasa bahwa SIPD memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugas mereka, terutama dalam hal akses data dan otomatisasi proses. Namun, perubahan sistem yang dinamis serta keterbatasan fleksibilitas dalam alur kerja menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan usability sistem tidak hanya bergantung pada desain teknis, tetapi juga pada pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan sistem.

Analisis Berdasarkan *DeLone dan McLean Information System Success Model*

Berdasarkan model *DeLone & McLean*, keberhasilan implementasi SIPD dapat dianalisis secara lebih komprehensif melalui enam dimensi utama yang saling berkaitan.

Pada dimensi kualitas sistem (*system quality*), masih terdapat berbagai kendala teknis seperti maintenance sistem, keterlambatan penyimpanan data, dan ketergantungan pada jaringan internet, yang menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya stabil dan optimal. Pada dimensi kualitas informasi (*information quality*), permasalahan seperti ketidaksesuaian data antar modul dan double jurnal menunjukkan bahwa akurasi, konsistensi, dan keandalan data masih perlu ditingkatkan.

Pada dimensi kualitas layanan (*service quality*), dukungan teknis terhadap pengguna masih perlu diperkuat, terutama dalam hal responsivitas terhadap permasalahan yang terjadi. Meskipun demikian, pada dimensi penggunaan (*use*), SIPD telah digunakan secara luas karena sifatnya yang wajib dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada dimensi kepuasan pengguna (*user satisfaction*), pengguna secara umum merasa cukup puas dengan manfaat yang diberikan oleh sistem, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam penggunaannya. Sementara itu, pada dimensi manfaat bersih (*net benefits*), SIPD terbukti mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Analisis Berdasarkan *Human Capital Theory*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi SIPD. Pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam penggunaan sistem informasi cenderung lebih mampu mengoperasikan SIPD secara efektif dibandingkan dengan pegawai yang belum terbiasa dengan teknologi.

Pelatihan seperti Bimbingan Teknis (BIMTEK), penggunaan modul pembelajaran, serta pengalaman langsung dalam pengoperasian sistem menjadi faktor penting dalam meningkatkan kompetensi pegawai. Namun demikian, perubahan sistem yang dinamis menuntut adanya pengembangan kompetensi secara berkelanjutan agar pegawai dapat terus beradaptasi dengan pembaruan sistem.

Dengan demikian, dalam perspektif *Human Capital Theory*, investasi dalam pengembangan kompetensi SDM merupakan faktor kunci yang tidak dapat diabaikan dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi sistem informasi di sektor publik.

Efisiensi Administrasi Keuangan Daerah

Secara keseluruhan, implementasi SIPD memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah. Sistem ini mampu mempercepat proses pencatatan transaksi, mengurangi kesalahan manual, serta meningkatkan kemudahan dalam mengakses data dan laporan keuangan.

Namun demikian, efisiensi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kendala teknis sistem, kualitas data yang belum konsisten, serta tingkat kompetensi pengguna yang bervariasi. Selain itu, proses koreksi dan penyesuaian data yang masih dilakukan secara rutin setiap bulan menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya mampu mengeliminasi kesalahan pencatatan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kualitas sistem, memperkuat integrasi data, serta mengembangkan kompetensi SDM secara berkelanjutan agar implementasi SIPD dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jember telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pengelolaan administrasi keuangan daerah. SIPD mampu mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari penganggaran, penggajian, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporan keuangan dalam satu sistem yang terstruktur dan terstandarisasi, sehingga meningkatkan keteraturan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dari perspektif *Technology Acceptance Model* (*TAM*), SIPD memiliki tingkat persepsi kemanfaatan yang tinggi karena mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai, meskipun pada aspek kemudahan penggunaan masih memerlukan proses adaptasi, terutama pada tahap awal implementasi. Berdasarkan teori *usability (ISO 9241-11)*, sistem ini telah cukup mendukung efektivitas dan efisiensi kerja, namun masih menghadapi kendala pada stabilitas sistem dan fleksibilitas penggunaan. Sementara itu, berdasarkan *DeLone and McLean Information System Success Model*, kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait akurasi data, konsistensi informasi, serta responsivitas dukungan teknis.

Selain itu, keberhasilan implementasi SIPD juga sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dijelaskan dalam *Human Capital Theory*, di mana kemampuan, pengalaman, dan pelatihan pegawai menjadi faktor penting dalam mendukung penggunaan sistem secara optimal.

Secara keseluruhan, SIPD telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah, namun masih diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan, baik dari sisi teknis sistem, integrasi data, maupun pengembangan kompetensi pengguna, agar implementasi SIPD dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi tata kelola keuangan daerah.

REFERENCES

Agnes Fontanella Un Bau, Henny A. Manafe, & Antonius Y. W. Timunen. (2025). Evaluasi penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao. *Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global, 2*(3), 123–130. https://doi.org/10.61132/aeppg.v2i3.1442

Amadhea Virdiana Phita, Iqbal Noor, & Acep Suherman. (2025). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan anggaran sebagai upaya mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas: Studi kasus Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi tahun

2021–2024. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan, 13*(1), 823–844. https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i1.5576

Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education* (3rd ed.). The University of Chicago Press.

Dahlia, D., & Ruswanti, R. (2025). Pengaruh penggunaan teknologi informasi dan kompetensi terhadap efektivitas kerja pegawai Kantor Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Majene. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi, 5*(2), 601–609. https://doi.org/10.56870/pz4h2w59

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly, 13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems, 19*(4), 9–30. https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748

De Vinci Research Center, Saba, P., DeLone, W., American University, Ul-Ain, N., De Vinci Research Center, Harfouche, A., Université Paris Nanterre, Ben Nasr, I., CERIIM, Excelia Group, Biot-Paquerot, G., Burgundy School of Business, Mallek, S., & Université de Lorraine. (2025). The DeLone and McLean Information Systems Success Model: What is the future evolution for its foundations, components, and applications? *Communications of the Association for Information Systems, 57*(1), 878–898. https://doi.org/10.17705/1CAIS.05738

DzaTAMa, K. F., Erna Daniati, & Anita Sari Wardani. (2025). *Usability* evaluation of the online marriage registration feature in SIMKAH. *Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing, 7*(3), 767–776. https://doi.org/10.47709/cnahpc.v7i3.6295

Gemawaty, C. A., & Yuliani, Y. (2026). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sistem informasi menggunakan model TAM. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi, 7*(1), 68–78. https://doi.org/10.63447/jimik.v7i1.1693

Grugulis, I. (2024). *Human capital theory*. Dalam K. Hutchings, S. Michailova, & A. Wilkinson (Ed.), *A guide to key theories for human resource management research* (hlm. 93–99). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781035308767.ch10

Gusman, S. W. (2024). Development of the Indonesian government's digital transformation. *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science, 5*(5), 1128–1141. https://doi.org/10.38035/dijemss.v5i5.2868

Hersadjati, M. A., Irawan, & Benius. (2025). Implementation of SIPD in regional financial management: Evidence from Murung Raya Regency. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 13*(6), 1675–1688. https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4462

Indrajit, R. E. (2002). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Andi Offset.

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 9241-11:2018 ergonomics of human-system interaction—Part 11: Usability: Definitions and concepts*. ISO.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Management information systems: Managing the digital firm* (14th ed.). Pearson Education.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (edisi terbaru). Andi Offset.

Masruroh, N., Hidayanti, N., Jannah Fauzia, R., & Romadhoni, N. I. (2024). Internalisasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. Eastasouth Journal of Impactive Community Services, 2(02), 89–106. https://doi.org/10.58812/ejimcs.v2i02.226

Nik Ahmad, N. A., Hamid, N. I. M., & Mohd Lokman, A. (2021). Performing *usability* evaluation on multi-platform based application for efficiency, effectiveness, and satisfaction enhancement. *International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), 15*(10), 103. https://doi.org/10.3991/ijim.v15i10.20429

Postgraduate Program, University of Merdeka Malang, Indonesia., Widigdyo, L. A., Tomo Ardianto, Y., Postgraduate Program, University of Merdeka Malang, Indonesia., Yuniawan, D., & Postgraduate Program, University of Merdeka Malang, Indonesia. (2025). User satisfaction with the personnel management information system at the Malang Regency's Personnel and Human

Resources Development Agency: An analysis of the effects of system, information, and service quality on *net benefit*. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis, 8*(04). https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i04-78

Rizki, D., Agustina, I., Sihotang, I. S. A., Rahmadini, N., Ramadhani, A., & Irawan. (2025). Characteristics of human resource competencies on the successful implementation of the regional government information system (SIPD) in improving the quality of financial reports at UPTD Pelayanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. *Proceedings of the International Conference on Computer Science, Engineering, Social Science, and Multi-Disciplinary Studies, 1*, 495–500. https://doi.org/10.64803/cessmuds.v1.99

Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *The American Economic Review, 51*(1), 1–17. https://www.jstor.org/stable/1818907

Sedarmayanti. (2012). *Good governance dan good corporate governance*. Mandar Maju.

Silvia Hardianti Manik, Ratna Sari Dewi, Indra Fauzi, & Henny Andiyani Wirananda. (2025a). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan Kota Subulussalam. *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan, 4*(3), 125–134. https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v4i3.3178

Silvia Hardianti Manik, Ratna Sari Dewi, Indra Fauzi, & Henny Andiyani Wirananda. (2025b). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan Kota Subulussalam. *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan, 4*(3), 125–134. https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v4i3.3178

Sulistyanti, Y. S. (2025). Evaluasi *usability* website menggunakan *System Usability Scale* pada aplikasi SIPD e-BMD Pemerintah Kota Salatiga. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 9*(2), 190–212. https://doi.org/10.31092/jmkp.v9i2.3592